



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RICHARD
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 863193

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 740 m2/285 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 920 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 1770 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 9777 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , WARISAN Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 10721 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , WARISAN Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 269.000.000

1. MOBIL, FODR ECOSPORT 1.5L AT-TITANIUM Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, TOYOTA HILUX PICK UP 2.0L MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA C1C02N16M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA D1B02NR6L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.000.000



F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.359.000.000

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.359.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.